

## Lamongan: Sebuah Kota dalam Dinamika Kebudayaan Islam dan Maritim di Pantai Utara Jawa

### Lamongan in the Dynamics of Maritime Culture and Islam on the North Coast of Java

Mrr. Ratna Endang Widuatie<sup>1</sup>, Sri Ana Handayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Jember, Indonesia

Penulis koresponden: ratnaendang.sastra@unej.ac.id

#### Abstrak

Lamongan merupakan salah satu kota pesisir utara Jawa yang memiliki peran penting dalam sejarah maritim Indonesia maupun sejarah kebudayaan Islam di Jawa. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi sejarah Lamongan sebagai pusat penyebaran Islam dan pusat pengembangan budaya maritim. Sebagai salah satu pusat penyebaran Islam pada abad ke-16, Lamongan menjadi bagian penting dalam transisi kebudayaan era Hindu-Buddha ke Islam. Posisinya sebagai kota pantai juga menjadikan Lamongan sebagai salah satu persinggahan penting dalam jalur perdagangan laut Nusantara. Aspek geografis dan kultural memberikan corak yang khas terhadap Lamongan sebagai kota yang mengalami kontak budaya selama berabad-abad dan menguatkan kredensial Lamongan sebagai salah satu pusat kebudayaan maritim yang penting di Jawa Timur.

Kata kunci: budaya; Islam; Jawa Timur; Lamongan; maritim

#### Abstract

Lamongan is one of the northern coastal cities of Java that has an important role in the maritime history of Indonesia and the history of Islamic culture in Java. As one of the centers of the spread of Islam in the 16th century, Lamongan became an important part of the cultural transition from the Hindu-Buddhist era to Islam. Its position as a coastal city also made Lamongan an important stopover on the Nusantara sea trade route. These geographical and cultural aspects give Lamongan a distinctive character as a city that has experienced centuries of cultural contact and strengthened its credentials as one of the important maritime cultural centers in East Java.

Keywords: culture; Islam; East Java; Lamongan; maritime

**Riwayat Artikel:** Diajukan: 9 Mei 2024; Disetujui: 14 Agustus 2024

### 1. Pendahuluan

Lamongan (secara administratif: Kabupaten Lamongan) terletak pada koordinat  $6^{\circ}51'54''-7^{\circ}23'6''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}4'41''-112^{\circ}33'12''$  Bujur Timur. Secara geografis, Lamongan berada di pesisir utara Jawa Timur dan memiliki garis pantai sepanjang sekitar 47 km. Hal itu menempatkan Lamongan sebagai salah satu bagian dari mata rantai jalur pantura (pantai utara) dalam konteks ekonomi maupun budaya populer. Posisi Lamongan yang menghadap Laut Jawa dan berdekatan dengan Tuban di bagian barat, serta Gresik dan Surabaya di sisi timur di mana kota-kota tadi adalah pelabuhan utama menjadikan Lamongan semestinya dipandang strategis dalam konteks perdagangan lintas laut di Nusantara. Namun, demikian, Lamongan jarang disebut dalam deretan kota-kota pantai yang

berpengaruh di pesisir utara Jawa Timur pada abad penjelajahan maritim. Dalam *Suma Oriental* yang disusun berdasarkan catatan Tomé Pires tahun 1512–1515, disebutkan kota-kota di Jawa bagian timur adalah *Tobam* (Tuban), *Cedayo* (Sedayu), *Agacij* (Gresik), *Curubaya* (Surabaya), *Gamda*, *Balumbuam* (Blambangan), *Pajarucam* (Pajajaran), *Camtã*, *Panaruncã*, *Chamdy*, dan Madura. Menurut Pires, para penguasa kota-kota pantai adalah muslim dan mereka memiliki kontrol yang besar terhadap perdagangan karena sekaligus mengepalai kapal-kapal *jung* dan juga penduduk (Pires, 1944: 166 dan 182).

“Absen”-nya Lamongan dari catatan Pires bukan karena penulisnya melewatkannya, melainkan signifikansi wilayah ini pada periode penulisan *Suma Oriental* (1512–1515) masih berada di antara bayang-bayang Tuban dan Sedayu sebagai dua kota pelabuhan yang penting. Tuban telah muncul sebagai kota pantai yang tanggung sejak era Majapahit awal dengan adipati yang terkenal Ronggolawe, serta trah Wilwatikta yang berkuasa ketika Islam mulai menyebar di Majapahit. Sesungguhnya Lamongan baru muncul setengah abad berikutnya, yaitu pada 1569 ketika Tumenggung Surajaya dilantik oleh Sunan Prapen menjadi adipati. Mengenai toponim “Lamongan” sendiri semua sumber sejarah rata-rata sepakat merujuk pada nama Mbah Lamong yang merupakan gelar *sepuh* bagi Hadi atau Ronggo Hadi yang tidak lain daripada *asma timur* (nama muda) Tumenggung Surajaya. Artinya nama Lamongan disematkan berdasarkan nama pemimpin pertama di wilayah tersebut (JDIH Kabupaten Lamongan; Camalia, 2015: 74–83; Husain dkk., 2017: 48–50).

Kemunculan Lamongan sebagai entitas sosial-politik yang terhitung paling “muda” dibandingkan dengan kota-kota lainnya di pesisir utara Jawa Timur dapat dilihat sebagai sebuah upaya penguatan Islamisasi di Jawa. Pelantikan Tumenggung Surajaya oleh Sunan Prapen dari Kedaton Giri (Gresik) merupakan sebuah strategi untuk menyesuaikan upaya Islamisasi dari semula berupa dakwah konvensional oleh para wali dan ulama, menjadi sebuah bentuk yang lebih formal dan kompleks yaitu Kadipaten Lamongan. Bentuk kadipaten memungkinkan Islam masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat baik melalui hukum, tatanan sosial, sistem ekonomi, kewajiban syariat, maupun pengambilan keputusan politik. Artinya, melalui pendirian Kadipaten Lamongan pada 1569 dengan Adipati Surajaya maka Islam telah dilembagakan sehingga kota yang baru ini dapat dilihat sebagai simpul Islamisasi yang penting sejak abad ke-16.

Pembahasan yang dapat dikaji lebih jauh antara lain tentang bagaimana peran Lamongan dalam konteks Islamisasi di pesisir utara Jawa? Pertanyaan ini penting untuk menganalisis lebih lanjut perkembangan Islam di wilayah Jawa Timur yang berkaitan

dengan aspek kekuasaan pada abad ke-16 hingga 18 yang merupakan landasan dan alasan bagi kuatnya Islam di Jawa.

Pertanyaan berikutnya adalah signifikansi peran Lamongan dalam perkembangan kemaritiman di Jawa. Relatif terhadap aspek strategisnya, Lamongan tidak sebesar Surabaya maupun Gresik yang memiliki garis pantai menghadap Selat Madura dan Laut Jawa sekaligus. Namun demikian, Lamongan menjadi penting karena menjadi mata rantai kadipaten pesisiran yang menjadi inti kekuatan kerajaan Islam di Jawa dalam mewujudkan cita-cita penyatuan Jawa.

Tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat maritim Lamongan menempatkan dirinya dalam era modern yang bertolak ukur pada aspek penguasaan ekonomi dan teknologi. Kegamangan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan bersifat semakin global dapat diantisipasi dengan penguatan jati diri sebagai bangsa bahari yang memiliki akar kebudayaan dalam dan teguh, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang perubahan dengan segala konsekuensinya.

## 2. Metode

Analisis terhadap kehidupan maritim Lamongan dalam tulisan ini menggunakan konsep yang disusun Geoffrey Till tentang komponen *seapower* atau kekuatan yang menentukan dalam proyeksi keunggulan maritim. Menurut Till, perlu disadari serta dikelola pentingnya *maritime people* yang mencakup masyarakat dan pemerintah; *maritime geography*; *resources*; dan *maritime economy* (2009: 84–105). Sekalipun Till memperkenalkan konsepnya dalam konteks pertahanan, namun secara teoretis dapat digunakan untuk menganalisis situasi dan potensi kemaritiman yang dimiliki suatu daerah. Masing-masing unsur dalam konsep Till dipaparkan dalam artikel ini melalui tinjauan historis terhadap Lamongan sebagai objek penelitian.

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari serangkaian langkah penelitian. Langkah-langkah yang harus dilalui dalam penelitian sejarah adalah (1) pemilihan topik penelitian (2) pengumpulan sumber (3) verifikasi (4) interpretasi dan (5) penulisan sejarah. Pengumpulan sumber diperoleh melalui pembacaan dari bahan-bahan pustaka berupa buku, makalah, artikel, berita dan laporan penelitian. Dua kelompok data digunakan untuk menyusun tulisan ini berupa data primer dan data sekunder. Data yang sudah terkumpul kemudian diverifikasi untuk memperoleh data yang otentik (asli) dan kredibel (bisa dipercaya). Data yang sudah diketahui autentisitas dan kredibilitasnya

kemudian di interpretasi dengan analisis dan kemudian disintesis dengan melihat hubungan antardata secara keseluruhan untuk mendapatkan pemaknaan dan kesimpulan secara komprehensif. Tahap akhir adalah penulisan dengan memperhatikan aspek kronologi (historiografi) untuk menghasilkan tulisan yang memenuhi asas eksplanasi atau penjelasan secara historis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Islamisasi Jawa pada Masa Transisi (Abad ke-15 dan ke-16)

Jawa Timur diyakini sebagai awal mula perkembangan Islam di Jawa. Pendapat ini didasari temuan arkeologis berupa batu bertulis serupa nisan dengan nama tertera *Fatimah binti Maimun bin Hibatallah* (wafat Jumat, 12 Rabiul Awal 475 H/1082 M) di Leran, Gresik (Harkantiningasih *et al.*, 1998: 7). Namun para sarjana bersengketa pendapat mengenai apakah prasasti itu betul-betul sebuah penanda makam ataukah batu *balast* kapal (Guillot dan Kalus, 2008). Namun yang jelas, keberadaan nisan Leran membuktikan adanya kontak antara Jawa dengan negeri asing melalui jalur laut. Temuan berikutnya yang berangka tahun lebih muda, yaitu nisan di Trowulan yang tertarih 1290 Saka atau antara 1368–1369 Masehi. Temuan sejenis di Troloyo memuat angka yang bervariasi antara tahun 1298 hingga 1533 Saka, atau 1376 hingga 1611 Masehi (Suhadi dan Hambali, 1994/1995: 4–5).

Batu nisan Trowulan dan Troloyo (keduanya di Mojokerto yang merupakan pedalaman) dianggap menarik sebab menunjukkan ciri-ciri makam Islam, lengkap dengan ornamen kaligrafi ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan tersedia seniman yang cukup cakap memahami *khat* (sistem tata tulis Al-Qur'an) ala *kufi* sekaligus menguasai seni ukir untuk membuat nisan-nisan Trowulan (Harkantiningasih *et al.*, 1998: 7–8). Adapun untuk pemakaman Troloyo menunjukkan gaya penulisan gaya Sulus dan Naskhi. Gaya Naskhi lebih dominan, diduga memang disengaja untuk memudahkan pembuatan inskripsi maupun pembacaannya bagi generasi berikut (Chawari, 1997: 52–61). Namun, penggunaan tahun Saka alih-alih Hijriyah menunjukkan bahwa periode wafatnya para “pemilik” nisan itu terjadi pada saat Majapahit masih berdiri sebagai kerajaan Hindu. Pula posisi makam yang berdekatan dengan pusat kekuasaan memunculkan dugaan para ahli kubur adalah kalangan elit istana.

Temuan makam Islam di Mojokerto menunjukkan bahwa Islam telah diterima, setidaknya oleh kelompok masyarakat pada strata sosial yang tinggi pada masa lampau. Jalur pelayaran tentu memegang peranan penting dalam islamisasi, karena laut merupakan satu-satunya penghubung antara Jawa dengan wilayah pusat peradaban Islam di Timur Tengah

maupun Asia Selatan. Dalam pembahasan era Majapahit, maka kota-kota pesisir seperti Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya harus dilihat sebagai gerbang masuknya pengaruh Islam baik oleh para saudagar maupun oleh ulama-mubalig (Sulistiyono, 2017: 1–19).

Salah satu makam yang memberi informasi lebih jauh tentang keberadaan para pendakwah Islam adalah makam Malik Ibrahim (wafat Senin, 12 Rabiul Awal 822 H/1419 M) yang ditemukan di Gresik (Harkantiningasih *et al.*, 1998: 8–9). Tradisi lisan masyarakat Jawa menginformasikan bahwa Malik Ibrahim adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim alias Kakek Bantal, salah satu wali paling senior dari jajaran Wali Sanga. Menariknya, tarikh makam Malik Ibrahim hanya berselang tiga tahun pasca kunjungan Ma Huan, penulis kronik Tiongkok *Ying-yai Sheng-lan* (Peninjauan Pesisir Samudera). Ma Huan dalam kroniknya yang rampung digarap tahun 1451 menyebutkan bahwa di antara penduduk Jawa terdapat orang-orang muslim dari barat (Ricklefs, 1994: 6). Tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Ma Huan dan Malik Ibrahim pernah bertemu, namun setidaknya keberadaan makam Malik Ibrahim di satu pihak menguatkan kesaksian Ma Huan di pihak lain. Terutama karena Malik Ibrahim diyakini oleh muslim Jawa sebagai seorang *habib* atau keturunan Nabi Muhammad.

Babad Tanah Jawi sebagai himpunan historiografi tradisional Jawa mencatat bahwa beberapa wali merupakan bagian dari keluarga keraton Majapahit. Setidaknya ada dua jalur kekerabatan, pertama dari pernikahan dalam arti sang wali menikahi wanita ningrat. Contoh dalam hal ini adalah Raden Rahmat Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Jalur kedua adalah semi genealogis, misalnya Raden Said atau Sunan Kalijaga menikahi putri Sunan Ampel, sehingga secara garis kekerabatan Jawa juga merupakan cucu dari Brawijaya Kertabumi sebagai raja terakhir Majapahit dari Dinasti Rajasa (Kertapradja, 2014: 17–19).

Salah satu putra Sunan Ampel bernama Qosim dididik sebagai penerus dakwah. Ketika dewasa, Qosim mendirikan pusat kegiatan agama Islam di Desa Drajat sehingga dikenal sebagai Sunan Drajat. Wilayah Drajat kini masuk Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Aktivitas dakwah Sunan Drajat tidak hanya terbatas dalam penyebaran agama Islam dalam arti syariat, namun juga sebagai penguatan masyarakat Lamongan secara sosial-politik. Masa-masa dakwah Sunan Drajat berbarengan dengan runtuhnya Majapahit, sehingga masyarakat kehilangan negara sebagai pengayom. Pada masa inilah Sunan Drajat hadir sebagai penghulu rakyat dengan ajaran-ajaran filsafatnya yang berisi gagasan kesejahteraan sosial dalam membangun masyarakat dan negara. Kondisi tersebut menurut

ajaran Sunan Drajat dapat dicapai dengan menjalankan perintah agama yaitu bersikap dermawan, yaitu orang yang mampu membantu yang tidak mampu (Sunyoto, 2017: 309).

Oleh karena Wali Sanga merupakan penghulu Kesultanan Demak, Sultan Ali Akbar atau Raden Patah memberikan status *perdikan* terhadap wilayah Drajat dan Sunan Drajat diminta bertindak sebagai penguasa wilayah (Muharor, dkk., 2021: 275–283). Kebijakan ini pada satu sisi menunjukkan penerimaan Demak terhadap ajaran Sunan Drajat, dalam arti penguasa memberikan keringanan kepada rakyat dengan membebaskan wilayahnya dari pajak. Di sisi lain, dengan dijadikan perdikan akan tumbuh loyalitas vertikal dari rakyat kepada pemimpinnya. Kesetiaan ini penting karena situasi sosial-politik wilayah eks-Majapahit masih belum terpulihkan, sehingga wilayah-wilayah yang menjadi basis dakwah para wali perlu dirangkul dan ditenangkan secara politik. Diperkirakan bahwa Lamongan berhasil direbut oleh Demak antara 1541–1542 yang memberikan jalan bagi konsolidasi politik di kota-kota pantai bekas wilayah Majapahit (Graaf dan Pigeaud, 1986: 49).

Wilayah Drajat yang berada di antara Tuban dan Gresik merupakan faktor lain yang perlu diperhitungkan terkait pemberian status perdikan. Demak perlu mengamankan garis pantai utara Jawa untuk kepentingan politik dan pertahanan. Sepanjang wilayah Jawa Timur mulai dari Tuban hingga Surabaya merupakan basis dakwah para wali. Di Tuban ada Sunan Bonang, Lamongan dengan Sunan Drajat, Gresik dengan Sunan Giri, dan Surabaya menjadi pusat dakwah Sunan Ampel. Para wali memiliki pengaruh yang luas selain sebagai ulama, termasuk juga sebagai sesepuh masyarakat dan pelindung umat. Mengingat peran Wali Sanga dalam mendirikan Kesultanan Demak, cukup aman untuk menyebut bahwa para wali juga sebagai perwakilan kekuasaan Demak di daerah-daerah tersebut.

Keberadaan pusat kegiatan dakwah yang diinisiasi Sunan Drajat membuat Lamongan menjadi salah satu basis perkembangan Islam mula-mula di Jawa Timur. Salah satu ciri khas dari wilayah yang didiami Wali Sanga adalah tumbuhnya komunitas keagamaan yang solid, baik dalam bentuk pesantren maupun kultur masyarakat yang cenderung religius. Bukti religiositas masyarakat Lamongan dapat dilihat dari penggunaan toponimi Lamongan sendiri. Nama Lamongan berasal dari sebutan *Mbah Lamong*, gelar *sepuh* untuk Adipati Surajaya, adipati pertama Lamongan (Camalia, 2015: 74–83; Husain, dkk., 2016: 41–42).

Pada masa mudanya, Surajaya bernama Hadi yang memiliki jabatan *rangga* sehingga dikenal sebagai Ranga Hadi, sekaligus merupakan salah satu santri dari Sunan Prapen. Ranga Hadi kemudian mendapat mandat sebagai adipati dan dilantik oleh Sunan Prapen pada tanggal 10 Dzulhijjah 976 Hijriyah atau 26 Mei 1569 (Husain, dkk., 2016: 50).

Pemilihan tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Qurban menunjukkan aspek religiositas pendirian Kadipaten Lamongan. Di sisi lain, pelantikan adipati oleh penguasa Giri Kedaton menunjukkan bahwa secara politis, pengaruh ulama sebagai elit spiritual lebih kuat dibandingkan dengan elit politik atau *umara*, yang pada periode tersebut adalah Kerajaan Pajang. Secara politis, Pajang memang bukan keraton yang terlalu kuat dan solid karena bangkit dari konflik elite yang melemahkan dan meruntuhkan Demak (Ricklefs, 1994: 60–61).

Sekitar tahun 1587 atau 1588, kekuasaan Pajang surut secara drastis akibat kebangkitan keraton bernama Mataram. Pendiri Mataram adalah anak angkat Sultan Pajang, sehingga antara kemunduran Pajang dan kemunculan Mataram menimbulkan tanda tanya mengenai peristiwa suksesi di dalam suatu “keluarga besar” atukah konflik perebutan kekuasaan antarkerajaan. Sepeninggal Sultan Pajang Hadiwijaya kekuatan di Jawa bagian tengah beralih kepada Mataram. Raja pertama Mataram bergelar Panembahan Senopati, dan salah satu misinya adalah menaklukkan pantai utara Jawa bagian timur. Tujuannya menaklukkan Surabaya sebagai kota pelabuhan terbesar di kawasan ini. Usaha Senopati diawali dengan merebut kota-kota pedalaman di seberang timur Bengawan Solo, kemudian menuju Tuban (1598–1599), namun penaklukan Tuban tidak berhasil (Ricklefs, 1994: 63).

Politik Mataram di bawah Panembahan Senopati yang ekspansif menempatkan kota-kota pantai utara Jawa timur dalam bahaya, situasi yang membuat mereka bersekutu untuk membendung invasi Mataram. Tuban, Lamongan, Sedayu, dan Gresik harus memperkuat diri. Kota-kota di pesisir utara Jawa Timur kemudian menjalin aliansi dengan Surabaya dalam menghadapi Mataram. Salah satunya dengan metode “perkawinan politik” yang memang jamak dilakukan di kalangan elit politik Jawa pada masa klasik. Adipati Jayalengkara sebagai penguasa Surabaya mengambil menantu wanita Lamongan untuk dipasangkan dengan putranya, Pangeran Pekik. Atas hubungan ini maka Lamongan menjadi salah satu prioritas pertahanan, terbukti dengan pembangunan beberapa pos pertahanan khusus oleh Pangeran Pekik di Lamongan. Meski demikian, melalui strategi yang sama Mataram perlahan-lahan berhasil melemahkan konsolidasi para adipati pantura. Pada 1612, pasukan Mataram di bawah komando Tumenggung Mertoloyo berhasil merebut Lamongan dan mengepung Surabaya. Kota berbenteng ini pun akhirnya takluk pada 1625. Selanjutnya Lamongan dan wilayah lainnya disatukan di bawah otoritas Surabaya hingga 1677 (Husain dkk., 2017: 50–51).

### 3.2 Signifikansi Lamongan dalam Konteks Kemaritiman

Sejumlah sumber sejarah penting menguatkan signifikansi maritim wilayah Lamongan sejak masa prakolonial, di antaranya Prasasti Biluluk yang merupakan rangkaian prasasti dari masa Majapahit. Prasasti Biluluk I berangka tahun 1288 Saka (1366 M), prasasti Biluluk II berangka tahun 1315 Saka (1383 M), prasasti Biluluk III berangka tahun 1317 Saka (1385 M), dan prasasti Biluluk IV tanpa angka tahun.

Menurut Prasasti Biluluk yang mengisahkan masa Airlangga, penduduk Biluluk diberi izin menimba air garam untuk keperluan upacara pemujaan yang dilakukan setahun sekali. Air garam ini bebas digunakan kecuali untuk diperdagangkan, karena apabila dijual dikenakan cukai. Rakyat Biluluk juga diperkenankan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti berdagang, membuat arak, memotong, mencuci, mewarna (kegiatan tekstil), membuat gula, dan membuat gamping dengan pembebasan pajak. Kebijakan fiskal ala Airlangga ini membawa kemakmuran bagi penduduk Biluluk. Komoditas unggulan dari Biluluk termasuk garam, gula, dan dendeng (Yamin, 1962: 149–158). Komoditas ini mengindikasikan adanya aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan laut, karena garam dihasilkan dari pengeringan air laut dan dendeng juga memerlukan garam untuk mengawetkan daging agar tidak tercemar mikroba pembusuk.

Sementara menurut Prasasti Karang Bogem yang bertariikh 1387 M dan ditemukan di Gresik, penduduk Karang Bogem merupakan nelayan tambak serta terdapat pelabuhan yang ramai (Yamin, 1962: 143–144). Posisi Karang Bogem yang menghadap Laut Jawa serta Selat Madura menjadikannya sesuai untuk aktivitas pelayaran lintas laut yang menggunakan kapal berukuran sedang hingga besar.

Teknologi pembuatan kapal merupakan salah satu kunci kemajuan suatu masyarakat maritim. Umumnya masyarakat maritim yang berbudaya tinggi telah mengembangkan rancang bangun perahu atau kapal yang spesifik. Lamongan memiliki jenis perahu yang disebut *ijon-ijon*. Perahu jenis ini digunakan terutama untuk penangkapan ikan. Ciri khas *ijon-ijon* ini adalah desain *hull* atau lambung yang gemuk sehingga mampu menampung hasil tangkapan dengan jumlah besar. Selain itu, sejumlah perahu dibentuk dan dinamai layaknya bagian riasan kaum wanita. Bagian tersebut di antaranya *inggi tumpul/papak* dan badan gemuk. Selain itu, juga terdapat simbol topeng, mata, alis, *ukel* atau sanggul (gelungan rambut tradisional), *makutha* (rambut), dan bunga (Warisan Budaya, 2022).

Perahu *ijon-ijon* diperkirakan merupakan adaptasi dari perahu *Jung Madura* yang diperkenalkan pelaut Madura bernama Surosirokapak yang berlabuh di pesisir Lamongan tahun 1890. Perahu *Jung Madura* yang digunakan Surosirokapak masih menggunakan layar

dari kain bagor atau anyaman sisal. Rancang bangun perahu *Jung Madura* dipelajari dan dikembangkan oleh para pembuat perahu di galangan tradisional Desa Kandangsemangkon. Secara fungsi, perahu ijon-ijon digunakan nelayan Lamongan untuk menangkap, menyimpan, mengangkut, dan mengawetkan ikan hasil tangkapan. Ketika teknologi pendinginan hasil laut diperkenalkan, perahu ijon-ijon juga dimanfaatkan untuk mendinginkan ikan sehingga lebih awet dan tidak busuk ketika sampai di daratan.

Perahu ijon-ijon mendapat atensi luas pada 1936, ketika terjadi kecelakaan laut yang mengakibatkan kapal milik maskapai Belanda, *SS van der Wijk* tenggelam di lepas pantai Brondong. Para nelayan dengan sukarela melakukan evakuasi korban dengan perahu-perahu ijon-ijon. Sebagai penghargaan atas sikap kemanusiaan para nelayan Lamongan, pemerintah Hindia Belanda membangun monumen peringatan di pantai Brondong. Plakat monumen itu berbunyi *Tanda-peringatan kepada penoeloeng-penoeloeng waktoe tenggelamnja kapal "Van der Wijk" DDO. 19–20 October 1936.*

Pengakuan atas perahu ijon-ijon sebagai produk budaya maritim Lamongan telah diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan perahu ijon-ijon sebagai *intangible heritage* atau warisan budaya tak benda milik Desa Karangsemangkon dan Kabupaten Lamongan. Sertifikat warisan budaya tak benda diberikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Lamongan, Siti Rubikah pada malam penganugerahan *East Java Tourism Award 2022*, 10 Desember 2022 (Disparbud Lamongan, 2022).

Selain pengakuan secara budaya, potensi maritim Lamongan tengah diupayakan untuk terus dikembangkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan wilayah Brondong dan Paciran sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor industri maritim yang meliputi area seluas sekitar 200 hektar. KEK industri maritim Lamongan berfokus pada industri perkapalan dan sarana *off-shore* baik berupa penyediaan bahan baku, teknologi produksi, fasilitas pemeliharaan dan perawatan, dan pemasaran baik untuk pasar domestik maupun ekspor atau orientasi internasional.

### 3.3 Lamongan dalam Proyeksi Kemaritiman Abad Ke-21

Menghadapi dinamika sosial-ekonomi pada abad ke-21, masyarakat maritim Indonesia menghadapi sejumlah situasi baik yang menguntungkan maupun yang menantang. Situasi yang menguntungkan adalah sejarah bahwa Indonesia sebagai negara maritim memiliki keunggulan sumber daya maritim yang tersebar di seluruh pesisir Nusantara.

Bahwa yang dimaksudkan sebagai sumber daya manusia maritim adalah orang atau masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan dalam melakukan kegiatan di bidang kelautan, terlibat secara langsung maupun tidak langsung di bidang kelautan dengan orientasi pengembangan wilayah laut (Widjaja dan Kadarusman, 2019: 67).

Sebagai komunitas maritim, masyarakat nelayan Lamongan telah bersentuhan dengan produk kebudayaan lain selama berabad-abad. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa Islamisasi juga merupakan bagian dari kontak budaya antara masyarakat Jawa dengan pendatang, baik saudagar maupun ulama. Namun dalam perspektif historis, kontak budaya pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 yang menawarkan pendekatan teknologi dan ekonomi memberi dampak yang jauh berbeda dibandingkan dengan periode abad ke-16 hingga 20. Kontak budaya pada periode modern lebih merupakan ekspansi teknologi dan ekonomi dari pihak yang menguasai teknologi terbaru dan lebih kuat secara ekonomi terhadap masyarakat atau komunitas yang belum adaptif terhadap perkembangan terbaru. Hal inilah yang menyebabkan “ketertinggalan” masyarakat atau negara di era modern.

Dalam bidang ekonomi, secara global penguasaan pasar semakin condong kepada kelompok pemilik modal kapital. Hal tersebut memengaruhi pola pendudukan sebanding dengan kondisi dunia pada abad ke-20. Dengan demikian, dominasi suatu negara atau kelompok ekonomi tertentu terhadap negara lain tidak lagi dengan mengandalkan serangan militer, melainkan pendekatan ekonomi melalui kerja sama baik bersifat *G to G* atau *government to government*, maupun *B to G* atau *business to government*. Dalam sudut pandang ekonomi global, kerja sama antarpemerintahan atau perusahaan merupakan suatu keniscayaan. Namun, dalam perspektif kedaulatan ekonomi dan kebudayaan, pola-pola kerja sama ekonomi selalu memiliki konsekuensi logis yang harus dimitigasi sejak awal.

Indonesia yang selalu disebut-sebut berada pada jalur persilangan antara dua samudera dan dua benua, bagaimanapun akan selalu terdampak perubahan global. Muncul dan berkuasanya konglomerasi bisnis di berbagai bidang mengubah paradigma bahari dari sebuah proses kebudayaan menjadi *business oriented*. Laut yang menurut konsepsi budaya bahari adalah sebagai kekuatan alam yang besar dan disakralkan, secara perlahan namun pasti mulai dilihat sebagai kekayaan alam belaka. Selama beberapa dasawarsa terakhir, cara pandang orang Indonesia terhadap laut berubah menjadi gagasan eksplorasi baik sumber daya alam maupun aspek strategis ekonomi.

Salah satu bentuk perubahan di bidang kemaritiman adalah pergeseran peran masyarakat nelayan dari semula sebagai penjaga dan pengelola laut, berubah menjadi kelas

pekerja dalam ekonomi maritim modern. Menurut cara pandang tradisional, tidaklah manusia menjadi penguasa atas laut karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Tuhan semata. Manusia hanya diberikan peran di dalam kehidupan sehingga harus berlaku bijak dan taat. Namun paradigma modern melihat bahwa penguasaan atas laut dapat dimungkinkan dengan teknologi, dan penguasaan teknologi mensyaratkan kuasa ekonomi berupa modal, alat produksi, dan tenaga kerja.

Penguasaan ekonomi dan teknologi oleh komunitas yang eksklusif, dalam hal ini adalah negara-negara industri, telah memunculkan disrupsi, yaitu perubahan yang menghilangkan pola dan atau tatanan lama. Dalam konteks kemaritiman, disrupsi bukanlah hal yang asing baik dalam tataran lokal maupun internasional. Penggunaan mesin sebagai penggerak perahu atau kapal adalah sebetulnya disrupsi yang paling jamak terjadi. Teknologi mesin semakin efisien dan layar digantikan mesin uap yang jauh lebih bertenaga. Namun, hari ini tidak ada lagi perahu atau kapal dibangun dengan mesin uap, melainkan mesin diesel maritim yang teknologinya semakin canggih, begitu pula teknologi penangkapan dan budidaya hasil laut. Penggunaan *bagan* atau *sero* hanya dilakukan nelayan tradisional, sementara penangkapan ikan modern menggunakan jaring *trawl* atau alat pancing dengan *reel* yang dianggap memiliki efisiensi tinggi. *Overfishing* akhirnya menjadi isu ekologi yang meresahkan sehingga dilakukan pembatasan dan pelarangan alat tangkap tertentu maupun pembagian zona tangkapan. Sehingga dimunculkan anekdot bahwa disrupsi di bidang maritim memiliki disrupsi tersendiri.

Kekhawatiran banyak pihak bahwa disrupsi sebagai “anak kandung” globalisasi akan menghapuskan jati diri bangsa Indonesia semestinya dilihat dalam perspektif luas dan bijak. Bagaimanapun, perubahan adalah keniscayaan zaman dan posisi Indonesia yang strategis adalah alasan dari mudahnya perubahan timbul di negeri ini. Namun kita tidak dapat menyandarkan masa depan kepada perubahan tanpa memiliki sikap dan pegangan. Terkait dengan pergeseran peran masyarakat bahari yang hanya menjadi kelas pekerja dalam ekonomi maritim modern, semestinya hal ini dapat diantisipasi melalui penguatan peran sosial ekonomi masyarakat sebagai “pemain inti” dan bukan sebagai “pemain cadangan” apalagi hanya sebagai “penonton”.

Pemerintah bagaimanapun juga akhirnya menjadi harapan untuk menyiapkan dan menata sumber daya maritim di Indonesia dalam menghadapi dinamika zaman. Hal ini sejalan dengan konsep yang disusun Geoffrey Till tentang dasar-dasar kekuatan laut sebagai landasan sebuah “negara maritim”, yaitu adanya komunitas maritim, adanya sumber daya

maritim, letak geografis, dan adanya *political will* dari pemerintah (Till, 2009: 83–113; Widjaja dan Kadarusman, 2019: 68). Konsep Till menunjukkan bahwa otoritas maritim bukan hanya perlu ada, namun wajib ada dan harus pula memiliki wewenang yang kuat. Dalam kasus Indonesia pemerintah sebagai pihak yang paling berwenang sekaligus regulator kebijakan, perlu mempersiapkan masyarakat maritim dalam menyambut perubahan. Persiapan dalam hal ini untuk tidak dipersempit maknanya hanya sebatas “ekonomi praktis”. Misalnya, agar nantinya masyarakat bisa bekerja di pelabuhan, atau usaha masyarakat berkembang apabila di suatu tempat dibangun kawasan ekonomi maritim. Konsep seperti ini justru hanya akan mengerdilkan potensi maritim yang telah dibangun selama berabad-abad.

Untuk Lamongan, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Lamongan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2041. Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya maritim, peraturan daerah (perda) tersebut menyebutkan potensi maritim Lamongan dari segi geografis adalah posisi di sepanjang pantai utara (pantura) Jawa dengan garis pantai sepanjang 47 km, dan kedalaman laut 12 m sebagai keuntungan alamiah. Letak Lamongan yang tidak jauh dari Surabaya, baik sebagai ibukota administratif maupun “ibukota perekonomian” Jawa Timur memudahkan arus distribusi barang dan jasa.

Kegiatan industri kemaritiman di Lamongan berada di wilayah utara, yang meliputi *Lamongan Shorebase*. Sektor perikanan masih menjadi salah satu andalan perekonomian maritim Lamongan. Terdapat empat sektor perikanan yaitu sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir melalui produksi garam, dan sektor peningkatan daya saing produk perikanan. Fasilitas pokok yang berkaitan dengan perikanan di Lamongan adalah adanya lima pelabuhan pelelangan ikan, dengan Pelabuhan Brondong sebagai yang paling besar. Diperkirakan kapasitas perikanan Brondong per tahunnya ada pada angka 63, 973,9 ton.

Selain fasilitas, perlu dilihat potensi sumber daya manusia. Harus diakui bahwa dalam Perda Nomor 8 Tahun 2021, perspektif sumber daya manusia di sektor maritim masih ada pada level “tenaga kerja”. Mengacu pada data tahun 2020, tenaga kerja di sektor perikanan budidaya mencapai 38 ribu jiwa, nelayan laut di angka 20 ribuan, dan nelayan perairan umum pada kisaran 4 ribuan. Jumlah industri perikanan pada 2020 diperoleh angka 1076 perusahaan terdaftar. Angka-angka tersebut niscaya akan mengalami dinamika sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan potensi yang dimiliki Lamongan khususnya dalam sektor maritim, dapat dilakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada masyarakat maritim. Pemberdayaan dapat berupa kegiatan pembekalan kemampuan baik teknis maupun sosial dalam menghadapi industrialisasi di bidang maritim. Pembangunan sekolah-sekolah berbasis ilmu kelautan merupakan langkah yang sudah dilakukan dan patut diapresiasi. Dalam hal ini telah dipersiapkan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknis, sehingga mampu beradaptasi dengan teknologi di bidang industri yang akan semakin berkembang di masa mendatang.

Bentuk penguatan lainnya adalah perlindungan terhadap kebudayaan maritim yang sudah ada dan hidup di masyarakat. Kehidupan masyarakat nelayan di pesisir pantai utara Jawa, khususnya Lamongan memiliki akar sejarah yang panjang. Jauh sebelum kolonialisme Belanda, masyarakat Lamongan telah membangun sistem kehidupan yang mewakili aspek geografis dan religi. *Perdikan* Drajat merupakan pengakuan otoritas Demak terhadap eksistensi masyarakat Lamongan, begitu pula pelantikan Adipati Surajaya oleh ulama Giri Kedaton menunjukkan bahwa Lamongan telah memiliki sistem kebudayaan yang tertata sejak abad ke-16. Pemerintah perlu memberi perlindungan terhadap kebebasan masyarakat Lamongan menjalankan kehidupannya yang bercorak agraris, religius, dan maritim sebagai penguatan jati diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang merupakan konsekuensi dari dinamika perekonomian nasional. Sertifikasi perahu ijon-ijon sebagai *intangible heritage* atau warisan budaya tak benda merupakan langkah maju yang sangat diapresiasi, serta dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk menguatkan warisan kebudayaannya.

Sebagai masyarakat religius, pada dasarnya masyarakat Lamongan menjalankan kehidupannya di dalam pola-pola sosial yang erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Hal ini merupakan kekayaan budaya yang tidak semua daerah memilikinya, karena kekhasan Lamongan yang memiliki “wali” atau hampir sama dengan pengertian *saint* dalam masyarakat Eropa. Sunan Drajat sebagai tokoh sejarah yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Lamongan, juga merupakan tokoh kebudayaan. Sunan Drajat melihat bahwa masyarakat Jawa pada masa transisi dari keruntuhan Majapahit menuju kebangkitan kerajaan Islam Jawa (Demak) mengalami kegamangan sosial. Bagaimanapun juga, keruntuhan entitas politik selalu mengakibatkan krisis sosial dan moral. Dalam situasi ini, Sunan Drajat memperkenalkan ajaran Islam dalam wajah yang ramah kebudayaan. Yang dilakukan Sunan Drajat adalah mengubah sejumlah tembang macapat *pankukur*.

Kata *pangkur* berasal dari *mungkur* atau ‘bergerak mundur, mengundurkan diri dari keduniawian’, atau nafsu politik, angkara murka, dan menjauhi perilaku menyimpang. *Pangkur* merupakan manifestasi kesadaran seorang hamba terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dilakukannya dalam menjalani kehidupan. Melalui tembang pangkur, disampaikan pertobatan kepada Tuhan. Sunan Drajat juga memperkenalkan pangkur sebagai *pangundi isi quran* atau penjabaran intisari Kitab Suci Al-Quran. Dalam mengajarkan nilai-nilai Islam melalui pangkur, Sunan Drajat menggunakan media berupa seperangkat gamelan yang dikenal sebagai Kiai Singa Mengkok (Ainiyah dkk., 2019: 81–92; Sunyoto, 2017: 304–309). Metode ini membuat ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa karena adanya kedekatan kultural serta nilai-nilai kehidupan yang sejalan dengan aspek filsafat Jawa.

Fakta bahwa makam Sunan Drajat menjadi salah satu destinasi wisata religi andalan di Lamongan, bahkan Jawa Timur menunjukkan bahwa ajaran para wali diterima secara lintas zaman. Ada pengakuan terhadap memori kolektif masyarakat Islam Jawa terhadap proses Islamisasi dan akulturasi kebudayaan. Hal itu merupakan modal kultural yang penting dan berharga yang dimiliki Kabupaten Lamongan untuk menjadi dasar pembinaan mental masyarakatnya.

#### 4. Simpulan

Lamongan memiliki kekayaan budaya berupa aspek religi masyarakat dan kehidupan maritim yang keduanya saling berkaitan, dan menjadi identitas lokal. Proses kebudayaan yang berlangsung sejak masa Hindu-Buddha dan mengalami pelembagaan sejak abad ke-16 menjadikan kultur masyarakat Lamongan sarat akan nilai-nilai kebudayaan Islam sekaligus budaya maritim. Pengakuan atas nilai budaya Islam di Lamongan ditunjukkan oleh masyarakat muslim yang melakukan kegiatan ziarah terhadap makam dan petilasan Sunan Drajat.

Hal itu merupakan pengakuan publik atas sejarah Lamongan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Timur, khususnya untuk wilayah pesisir utara. Selain itu, secara resmi pemerintah Indonesia memberikan pengakuan dan penghargaan atas produk kebudayaan lokal masyarakat Lamongan melalui sertifikasi perahu ijon-ijon sebagai warisan budaya tak benda. Kedua bentuk pengakuan ini merupakan modal penting bagi Lamongan untuk memperkuat wilayah sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus kebudayaan maritim di tengah abad ke-21.

**Daftar Pustaka**

- Ainiyah, L., Kusmiyati, dan Haerussaleh. (2019). Analisis Nilai Religiusitas dan Makna dalam Tembang Pangkur Sunan Drajat. Dalam *Ksatra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 81–92.
- Camalia, M. (2015). Toponimi Kabupaten Lamongan (Kajian Antropologi Linguistik). Dalam *Parole* Vol. 5 No.1, April 2015, hlm. 74–83.
- Chawari, M. (1977). Inskripsi Berhuruf Arab di Kompleks Makam Troloyo (Kajian Terhadap Gaya Penulisan, Arti dan Maksud Inskripsi, serta Kronologinya). Dalam *Berkala Arkeologi*, 17(2), 1997, hlm. 52–61.
- Cortese, A. (1944). *The Suma Oriental of Tomé Pires*. London: The Hakluyt Society.
- Graaf, H.J. dan Pigeaud, Th. G. (1986). *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.
- Guillot, C. dan Kalus, L. (2008). *Inskripsi Islam tertua di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harkantiningasih, N., dkk. (1998). *Laporan Penelitian Situs Pasucinan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (1994–1996) No. 48*. Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi, 1997–1998.
- Herusatoto, B. (2001). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha Diwia.
- Husain, S.B., dkk. (2017). *Sejarah Lamongan dari Masa ke Masa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kertapradja. (2014). *Sêrat Babad Tanah Jawi (Edisi Prosa Bahasa Jawa)*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Mahaputra, G.P. dan Santoso, E.B. (2018). Arah Pengembangan Kawasan Industri Maritim di Wilayah Brondong-Paciran, Kabupaten Lamongan. Dalam *Jurnal Teknik ITS* Vol. 7, No. 2, (2018), hlm. 107–112.
- Muharor, M.Z., dkk. (2021). Dinamika Tanah Perdikan Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 1475–1995. Dalam *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, Vol. 1, No.3 hlm. 275–283.
- Munawaroh, S., dkk. (2017). *Perahu Tradisional Ijon-Ijon di Desa Kandang Semangkon Lamongan*. Yogyakarta: BPNB D.I. Yogyakarta.
- Olthof, W.L. (2017). *Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Narasi.
- Perahu Ijon-ijon Lamongan Resmi Jadi Warisan Budaya Tak Benda [online]. Dalam *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Lamongan* <https://www.lamongankab.go.id/beranda/disparbud/post/7635>

- Perahu Tradisional Ijon-Ijon Lamongan [online]. Dalam *Budaya Kita–Kemdikbud* <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/budayakita/wbtb/objek/AA001665>
- Peraturan. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2041.
- Ricklefs, M.C. (1994). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sejarah Kota Lamongan [online]. Dalam *JDIH Bagian Hukum Kabupaten Lamongan* [https://kablamongan.jdih.jatimprov.go.id/portfolio\\_page/15950/](https://kablamongan.jdih.jatimprov.go.id/portfolio_page/15950/)
- Suhadi, M. dan Hambali, H. (1995). *Makam-makam Wali Sanga di Jawa*. Jakarta: Depdikbud, 1994/1995.
- Sulistiyono, S.T. (2017). Peran Pantai Utara Jawa dalam Jaringan Perdagangan Rempah. Dalam Seminar Nasional Mengenai Jalur Rempah dengan Tema “Rempah Mengubah Dunia” (Makassar: 11–13 Agustus 2017).
- Sunyoto, A. (2017). *Atlas Wali Songo*. Tangerang Selatan: Pustaka Iiman dan Lesbumi PBNU.
- Syahid, A., dkk. (2017). *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Till, G. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. New York: Routledge.
- Widjaja, S. dan Kadarusman (ed.). (2019). *Sosial Budaya Masyarakat Maritim*. Jakarta: Amafrad Press.
- Yamin, M. (1962). *Tatanegara Madjapahit*. Jakarta: Yayasan Prapanca.